

## **Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu**

**M. Ali Nasrun\***

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia*

### **ABSTRAK**

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merebak di seluruh wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Kapuas Hulu. Aspek ekonomi merupakan dampak yang paling mendapat perhatian setelah aspek kesehatan. Perekonomian Kapuas Hulu mengalami penurunan akibat pengaruh dari luar maupun keadaan di daerah sendiri. Krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak terpuruk lebih dalam lagi menjadi depresi ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan. Melalui kajian secara deskriptif kualitatif, makalah ini bertujuan untuk mengungkapkan basis ekonomi di Kapuas Hulu untuk melakukan pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Kapuas Hulu yang kaya akan sumber daya alam, serta masyarakatnya yang mayoritas sebagai petani dalam arti luas dan pertambangan, maka strategi pemulihan ekonomi adalah mengandalkan sektor pertanian dan usaha rakyat pada komoditi yang layak bisnis, mengembangkan perdagangan dan pasar lokal, penerapan teknologi informasi, serta mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai penguatan program pemulihan, harus ada kebijakan dan fasilitas dari pemerintah untuk menggerakkan dan memperlancar upaya pemulihan, serta harus melibatkan perusahaan besar yang ada di daerah untuk membantu pemberdayaan aspek bisnis pada usaha rakyat.

**JEL:** O20

**Kata kunci:** Covid-19, pemulihan ekonomi, strategi pembangunan daerah, Kapuas Hulu.

### **1. PENDAHULUAN**

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mulai terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020 merebak di seluruh wilayah, termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai dua pintu masuk, yaitu dari Kabupaten Sintang dan dari Lubuk Antu Serawak Malaysia. Covid-19 sejatinya merupakan kasus kesehatan. Namun dampaknya bukan hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi yang justru mempunyai pengaruh yang lebih luas terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kebijakan pemerintah mengharuskan adanya pembatasan gerak masyarakat, baik pada keluar masuk wilayah kabupaten, maupun di dalam daerah sendiri. Akibatnya aktivitas perekonomian menjadi terhambat, bahkan ada yang terhenti. Pengaruhnya, perekonomian Kapuas Hulu mengalami penurunan. Berhubung sudah berlangsung sejak dari awal tahun 2020, maka proses resesi tidak dapat dihindari. Krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak terpuruk lebih dalam lagi menjadi depresi ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan,

---

\* E-mail: m.ali.nasrun@ekonomi.untan.ac.id

keterlambatan akan memperparah keadaan dan menyulitkan pemulihannya (Sugiri, 2020; Herdiana, 2020; Todaro & Smith, 2015).

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

### **Krisis Ekonomi**

Krisis ekonomi baru menjadi perhatian serius semenjak terjadinya *great depression* 1930-an. Kejadian bermula dari penerapan teori Klasik yang mengatakan bahwa penawaran selalu akan mencipta permintaannya sendiri (*Say's Law*). Upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menerbitkan saham sebanyak mungkin. Hasilnya memang mengagumkan, produksi meningkat cepat. Namun, karena pendapatan buruh banyak dipergunakan untuk membeli saham, pendapatannya menjadi berkurang, akibatnya daya beli turun. Pendapatan tidak dapat untuk membeli seluruh hasil produksi. Akibatnya terjadi *over supply*. Stok barang meningkat, perusahaan mengalami kerugian. Akibat seterusnya, perusahaan harus mengurangi produksi. Karena itu, pemecatan buruh dan pegawai tidak dapat dihindari. Perekonomian kian merosot. Pada kondisi seperti ini, J.M. Keynes menawarkan solusinya dengan campur tangan pemerintah. Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan permintaan agregat dan investasi pemerintah. Perekonomian berhasil dipulihkan (Blanchard & Johnson, 2017).

Penyebab terjadinya krisis ekonomi bisa dari berbagai hal. Krisis ekonomi pada Perang Dunia Pertama dan Kedua dikarenakan seluruh negara kaya terlibat dalam perang. Akibatnya proses produksi, pasar, investasi di bidang ekonomi, dan perputaran keuangan terhenti. Anggaran negara banyak tersedot untuk membiayai perang. Krisis ekonomi pada 1970-an disebabkan oleh keadaan cuaca dunia. Kemarau yang panjang mengakibatkan hasil produksi pertanian banyak yang gagal. Situasi diperburuk lagi dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak akibat embargo OPEC. Krisis ekonomi pada 1980-an lebih banyak disebabkan oleh kekakuan perdagangan internasional karena adanya embargo perdagangan internasional oleh Amerika Serikat. Krisis keuangan pada 2008 diawali adanya krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat pada 2007. Gagal bayar pada lembaga keuangan merembet ke semua sektor, bahkan ke seluruh dunia berujung krisis ekonomi yang berkepanjangan (Blanchard & Johnson, 2017; Todaro & Smith, 2015).

Pada negara berkembang, dampak krisis ekonomi bisa lebih berat, jika kemampuan keuangan pemerintah tidak mencukupi untuk menanggulangi penurunan pada investasi, produksi, dan ekspor. Ketergantungan yang besar kepada negara maju, juga dapat memperparah dampak krisis di negara berkembang, karena krisis banyak terjadi pada negara maju (Todaro & Smith, 2015). Krisis ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi akan merosot. Jika tidak dapat ditanggulangi, maka krisis ekonomi yang berupa resesi akan berlanjut pada kondisi depresi. Kesigapan dan kemampuan menghentikan resesi akan menjadi kunci keberhasilan mengatasi krisis ekonomi. Dampak krisis dapat sedikit ditahan apa bila ada stimulus dari pemerintah. Pada negara berkembang mengatasi masalah krisis relatif lebih mudah dibandingkan kompleksnya perekonomian pada negara maju. Dengan adanya investasi yang relatif kecil, perekonomian negara berkembang dapat langsung menggeliat. Bila ditopang dengan kebijakan pemerintah dan ditambah stimulus yang tepat, pengusaha kecil dapat langsung bergerak (Todaro & Smith, 2015).

## Ekonomi Pembangunan Daerah

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak krisis ekonomi dapat diawali dengan membuat perencanaan dan strategi pembangunan yang tepat (Arsyad, 2010). Dalam perencanaan, tahap pertama yang harus ditetapkan adalah prioritas pembangunan. Harus fokus untuk menyelesaikan masalah utama. Kedua, mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan keadaan aktual. Ketiga, menetapkan strategi pelaksanaannya. Adanya kekhasan pada setiap daerah mendorong adanya konsep pembangunan daerah. Untuk itu, perlu terlebih dahulu diketahui mengenai karakteristik suatu daerah. Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung kepada apa yang dimiliki dan keadaan daerah, yaitu antara lain: sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, kewirausahaan, infrastruktur, pasar, dan keuangan pemerintah daerah.

Ada beberapa teori pembangunan daerah yang relevan untuk menanggulangi krisis ekonomi di tingkat daerah. *Economic base theory* merupakan salah satu teori yang mengusulkan pembangunan daerah berdasarkan kepada apa sektor usaha atau produk yang paling banyak diminta oleh masyarakat dari luar daerah. Produksi didasari dengan potensi sumber daya yang ada di lokal. Berikutnya ada teori lokasi. Teori ini memperhitungkan suatu lokasi yang paling ekonomis untuk menjadi lokasi industri. Teori yang cukup menarik adalah *central place theory*, yaitu suatu tempat sentral ekonomi yang didukung oleh beberapa tempat di sekitarnya. Interaksi antar daerah akan menjadi suatu kekuatan ekonomi setempat. Kemudian ada teori model daya tarik. Para pelaku ekonomi akan berupaya memperbaiki diri jika ada subsidi dan insentif dari pemerintah. Dalam paradigma baru pembangunan daerah, diyakini bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan kepada mekanisme pasar. Peran pemerintah sangat sentral dan menentukan dalam pergerakan perekonomian daerah, terutama untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Peranan pemerintah sangat diperlukan karena belum tentu teori *spread effects* oleh Myrdal dan teori *trickling down effects* oleh Hirshman dapat berjalan dengan baik (Arsyad, 2010). Pembangunan daerah harus secara maksimal mendayagunakan potensi dan peluang usaha yang ada di daerah, sebagai strategi pembangunan berbasis lokal (Arsyad, *et al*, 2011).

### Tinjauan Empiris

Singgih (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa UMKM merupakan basis perekonomian rakyat dan tempat bernaungnya sebagian besar pelaku ekonomi. Dalam pemulihan pasca krisis ekonomi, UMKM dapat lebih awal bergerak dengan kekuatan dan keadaan yang ada. Sehingga UMKM bertindak sebagai dinamisator perekonomian Indonesia. Hal itu dibuktikan pada saat dan pasca krisis ekonomi di Indonesia 1997. Peranan UMKM sangat strategis karena mampu menyerap sangat banyak tenaga kerja, sehingga dapat menjadi tumpuan untuk memperoleh pendapatan oleh sebagian besar rakyat. Pada umumnya, UMKM juga merupakan pemain lokal yang cukup dominan dan sering menjadi pioner dalam perluasan ekonomi daerah. Namun pengembangan UMKM tidaklah mudah. Ada berbagai keterbatasan yang melekat pada UMKM. Kelemahan yang paling utama adalah kekurangan modal dan rendahnya profesionalisme dalam berusaha. Informasi pasar menjadi hal sangat diperlukan oleh pelaku UMKM, karena berdasarkan informasi pasar, mereka akan menata usaha dan manajemen bisnisnya.

Penelitian Susilo dan Sutarta (2004) mengangkat permasalahan pada industri kecil pasca krisis ekonomi. Beberapa masalah yang mendera setelah krisis ekonomi antara mengenai mahalannya bahan baku. Akibatnya mereka harus menaikkan harga. Dampaknya daya saing usahanya menjadi turun. Rentetan dampak berikutnya adalah penurunan produksi atau usaha. Upaya untuk mengatasi

permasalahan adalah dengan inovasi produk. Mereka harus menyiasati dengan kreatif membuat produk baru atau cara baru.

Rusastra (2011) menyimpulkan harus ada reorientasi paradigma dan strategi pengentasan kemiskinan sebagai dampak adanya krisis ekonomi. Pembangunan perdesaan inklusif merupakan solusinya. Pertumbuhan ekonomi harus berimbang dengan upaya pemberdayaan masyarakat rentan. Perpaduan agrobisnis dan agroindustri harus menjadi model pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat dan modernisasi pertanian. Upaya tersebut juga untuk mengembangkan UMKM di daerah. Untuk itu, pemerintah harus mengembangkan infrastruktur, investasi, dan menjaga keadaan ekonomi. Pengentasan kemiskinan haruslah menjadi prioritas utama program pemerintah dan pembangunan daerah.

Lingkaran krisis ekonomi Indonesia diteliti oleh Salamah (2001). Krisis yang terjadi mulai 1997 diperkirakan tidak berakibat berat bagi perekonomian Indonesia, karena diyakini fondasi ekonomi makro yang kuat mampu menangkal krisis moneter. Namun faktanya, krisis moneter kemudian mengakibatkan krisis ekonomi di Indonesia. Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab, antara lain adanya *crony capitalism*, kepanikan masyarakat terhadap keadaan ekonomi, pengaruh eksternal ekonomi, struktur finansial dan ekonomi domestik rapuh. Upaya pemulihan dilakukan dengan menghambat arus modal keluar dan menguatkan nilai Rupiah. Pemulihan akan berjalan baik bilamana keadaan perpolitikan dan stabilitas nasional dalam keadaan yang kondusif.

Sunderlin, *et al* (2000) mengkaji mengenai dampak krisis ekonomi terhadap petani kecil dan tutupan lahan di luar Jawa. Mereka menemukan bahwa petani mengalami kerugian karena jatuhnya harga komoditi hasil pertanian mereka, yang pada umumnya merupakan komoditi ekspor. Walaupun ada juga komoditi yang justru meningkat harganya dengan adanya krisis ekonomi. Kedua kondisi tersebut, mendorong adanya diversifikasi usaha pertanian. Perluasan usaha pertanian berakibat semakin banyaknya perambahan hutan yang berarti luas penutupan hutan menjadi semakin mengecil. Untuk itu, sangat diperlukan adanya penyuluhan, bimbingan, dan bantuan kepada petani agar dalam perluasan usahanya tidak berakibat terjadinya deforestasi.

Sisi lain diungkapkan oleh Siburian (2002) dalam penelitian terhadap perekonomian rakyat perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak Malaysia. Rakyat di sekitar Entikong Kalimantan Barat, mengalami peningkatan ekonomi sebagai dampak dari krisis ekonomi 1998. Nilai rupiah yang turun atau kurs Ringgit Malaysia yang meningkat, mengakibatkan harga komoditas hasil pertanian masyarakat di sekitar berbatasan semakin tinggi, jika dihitung dengan Rupiah. Sebagian besar orientasi produksi pertanian sekitar perbatasan merupakan komoditas ekspor, karena mereka menjual ke Serawak. Usaha pokok pertanian rakyat berupa karet, hortikultura, peternakan, perikanan, padi, dan buah-buahan. Ketersediaan infra struktur berupa jalan dan transportasi umum, mempermudah rakyat menjual produknya ke perbatasan. Daya saing perdagangan di perbatasan juga sangat tinggi, karena harga komoditas dari wilayah Kalimantan Barat, bagi masyarakat Serawak jauh lebih murah dibandingkan dengan harga komoditas yang di wilayah Serawak, karena tingginya nilai Ringgit Malaysia.

Pengembangan usaha rakyat dengan mengembangkan kearifan lokal, promosi, teknologi informasi dan media sosial, dan bantuan modal (Ulya, 2020; Iskandar, *et al*, 2020; Pratiwi & Novianty, 2020; Hadi & Supardi, 2020; Mahriani, 2020).

### **3. METODE KAJIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu upaya untuk menggambarkan fenomena berdasarkan informasi yang detil dan mendalam dari objek penelitian (Leksono, 2013; Nugrahani, 2014; Tohardi, 2020). Objek penelitian di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat pada tahun 2020. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik dan publikasi pemerintah. Data primer bersumber dari informan berupa pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan pelaku usaha.

Metode analisis menggunakan analisis data model fenomenologi (Bogdan dan Taylor dalam Nugrahani, 2014). Analisis ini menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen yang terkait. Informasi lapangan disusun menjadi resume yang sistematis. Pembahasan dengan cara membandingkan resume lapangan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Kemudian diambil kesimpulan sebagai hasil penelitian.

### **4. HASIL KAJIAN**

#### Potensi Ekonomi

Kabupaten Kapuas Hulu terbagi ke dalam 23 kecamatan, 4 kelurahan dan 278 desa. Luas seluruh wilayahnya 29.842 Km<sup>2</sup>, atau merupakan 20,26% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Sebanyak 13,07% dari luas wilayah merupakan daerah perairan atau tergenang, dan 56,21% merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi. Kapuas Hulu termasuk dataran rendah dengan ketinggian 25 – 500 meter. Jumlah penduduk Kapuas Hulu sebanyak 246.772 jiwa (2019) dengan kepadatan 8,3 jiwa/km. Mayoritas penduduk berada di pedesaan. Sebanyak 69,73 % dari jumlah penduduk, merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Lapangan kerja pada sektor pertanian sebanyak 60,23 % dari total tenaga kerja 140.164 orang.

Hasil produksi (2019) produk unggulan Kapuas Hulu pada sub sektor pertanian: padi sawah 57.379 ton, ubi kayu 8.908 ton dan jagung 798 ton. Pada sub sektor perkebunan: sawit 911 ton (919 ha); karet 12.679 ton (47.316 ha); lada 11 ton (44 ha); kopi 4 ton (17 ha); dan kakao 25 ton (143 ha). Peternakan: daging sapi 272,5 ton; kambing 4,9 ton; babi 250,7 ton; ayam buras 120,3 ton; ayam ras 1.007,6 ton; itik 1,8 ton. Pada sub sektor perikanan menghasilkan 66.537,8 ton. Sektor industri terdiri dai tenun ikat, anyaman, tikar/lampit, kerupuk basah, dan kerupuk kering.

Komoditas yang belum seluruhnya didata dan dipublikasikan secara khusus oleh pemerintah adalah produksi dan lahan tanaman kratom atau purik (*Mitragyna Speciosa* Korth). Walaupun secara kasat mata sangat banyak masyarakat yang menanam dan berusaha kratom, bahkan penghasilan dari usaha kratom sangat mempengaruhi kehidupan keluarganya. Ada 21 juta batang kratom yang ditanam masyarakat. Demikian pula pada tambang emas milik rakyat, sarang burung walet, dan budi daya ikan Arwana (Silok).

#### Perkembangan 2020

Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan pada triwulan pertama dan kedua tahun 2020. Namun tidak semua sektor yang terpuruk dalam. Hal ini dibuktikan dengan data perubahan beberapa komoditi pada kurun waktu tersebut di Kapuas Hulu.

**Tabel Perubahan Komponen Ekonomi di Kapuas Hulu**

Komponen Ekonomi	2019		2020	
	Trw I	Trw II	Trw I	Trw II
Luas lahan panen padi (ha)	7.705	39	7.170	43
Dana pihak ketiga di perbankan (T Rupiah)	5, 56	1,60	1,61	1,70
Penyaluran kredit perbankan ( M Rupiah)	2.558	2.599	3.326	3.519

Sumber: Laporan BI Kalbar, Mei dan Agustus 2020.

Hasil wawancara dan pengamatan di beberapa kecamatan, kelurahan dan desa, menunjukkan bahwa sebagian besar usaha rakyat tidak mengalami penurunan yang berarti. Usaha rakyat tidak mengalami penurunan, seperti usaha pertanian (padi dan hortikultura), perikanan (tangkap dan tambak), budi daya Arwana, tambang emas rakyat, usaha kratom, pedagang eceran, toko bahan bangunan, usaha jas bengkel, dan sarang burung walet. Usaha rakyat yang mengalami penurunan, seperti jasa konstruksi, transportasi, perhotelan dan pariwisata. Media masa, berupa koran daerah Kalimantan Barat, tidak banyak mengungkapkan permasalahan, khususnya penurunan ekonomi di Kapuas Hulu.

Kebijakan pemerintah yang langsung berhubungan dengan dampak Covid-19 adalah adanya bantuan dari Pemerintah Pusat kepada UMKM di Kapuas Hulu. Ada 133 UMKM yang menerima bantuan masing-masing sebesar 2,4 juta Rupiah. Di Kapuas Hulu ada 1.023 UMKM (Timotiusius, Antara 31 Agustus 2020). Di samping adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, ada juga bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pembahasan

Perkembangan sektor pertanian dalam arti luas, yang tidak mengalami penurunan, sedangkan kontribusinya dalam PDRB sebesar 21,96% (2019) dan laju pertumbuhan 5,05% (2019), menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat dijadikan andalan dalam masa pemulihan ekonomi. Demikian juga pada usaha perdagangan eceran, termasuk warung makan dan industri rumah yang membuat makanan seperti kerupuk basah dan kue. Juga pada usaha tambang rakyat emas.

Pemilihan usaha dan komoditas yang menjadi andalan berdasarkan pada teori dan penelitian terdahulu. Pemulihan ekonomi harus dirancang seawal mungkin, agar keadaan tidak semakin sulit (Herdiana, 2020). Arsyad (2010; *et al*, 2011) dalam rangka pemulihan ekonomi harus ada prioritas pembangunan berdasarkan ketersediaan sumber daya dan keadaan aktual. Ketersediaan sumber daya alam dan budaya masyarakat dalam mengolah alam di Kapuas Hulu, mengharuskan pembangunan daerah lebih mengutamakan usaha-usaha yang terkait dengan sumber daya alam, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan menunjukkan perkembangan yang baik. Dalam menggerakkan perekonomian rakyat, harus mengutamakan UMKM (Singgih, 2007; Rusastra, 2011). Pola usaha harus meneruskan kearifan lokal (Pratiwi & Novianty, 2020). Keberadaan Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Serawak, harus dapat menjadi peluang untuk mengembangkan usaha rakyat (Siburian, 2002).

Melengkapi upaya pemulihan ekonomi, harus ada faktor pendukung, pelancar, dan strategi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan harus terdiri dari strategi dan program jangka pendek dan jangka panjang (Sugiri, 2020). Sesuai perkembangan zaman, maka usaha rakyat harus dikelola menggunakan digitalisasi, teknologi informasi, media massa, serta melakukan diversifikasi usaha (Pratiwi & Novianty, 2020; Ulya, 2020; Mahriani, 2020). Keadaan ekonomi yang terpuruk,

mengharuskan adanya tambahan modal bagi rakyat dan UMKM untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya (Iskandar, *et al*, 2020).

Secara khusus, usaha kratom pantas menjadi komoditi unggulan bagi Kapuas Hulu. Setelah terbitnya Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tanggal 3 Februari 2020 yang menjadi dasar hukum kratom sebagai produk legal, maka usaha kratom dapat menjadi komoditi andalan usaha rakyat dan program pembangunan daerah Kapuas Hulu. Kratom adalah tumbuhan liar di dataran rendah dan pantai sungai, bisa hidup di seluruh wilayah Kapuas Hulu, budi dayanya mudah dan relatif cepat dapat dipanen, pengolahan pasca panen yang mudah, harga jual yang cukup tinggi, pemasaran lokal sangat banyak, pemasaran ekspor ke banyak negara, termasuk negara maju dan kaya, serta masyarakat sangat menyukai mengusahakannya. Sehingga kratom sudah menjadi usaha rakyat hampir di seluruh wilayah Kapuas Hulu. Untuk memantapkan pengusahaannya, usaha kratom dapat menjadi unit usaha pada BUMDes dan koperasi. Sebagai induk badan usaha dapat dilakukan oleh BUMD. Keberadaan BUMDes, koperasi dan BUMD tidak harus mematikan usaha pribadi rakyat atau UMKM yang sudah ada. Justru dapat diorganisir sehingga menjadi suatu sistem usaha yang kuat. Peran BUMD yang perlu diwujudkan adalah membuat industri pengolah menjadi bahan jadi atau setengah jadi, serta menjadi eksportir langsung ke negara pembeli.

Peranan pemerintah yang diperlukan adalah membuat peta jalan (*road map*) program pemulihan perekonomian daerah. Mengorganisir semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah berupaya menyediakan dan memfasilitas adanya permodalan, baik berupa anggaran pemerintah maupun dari lembaga keuangan. Pemerintah harus mendorong pengusaha menengah dan besar yang ada di Kapuas Hulu untuk secara signifikan dan terorganisir membantu usaha rakyat dan UMKM yang berjuang memulihkan perekonomian daerah. Pemerintah harus dapat memfasilitasi pengembangan pemasaran ke kabupaten lain dan ke luar negeri. Juga memfasilitasi pengusaha atau investor dari luar yang bermaksud berinvestasi di Kapuas Hulu.

## **5. PENUTUP**

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Strategi dalam pemulihan ekonomi di Kapuas Hulu adalah mengandalkan usaha rakyat, UMKM, koperasi dan BUMDes yang mengolah sumber daya alam dan merupakan usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat dengan kearifan lokalnya, (2) Perlu penguatan usaha berupa: permodalan, jaringan telekomunikasi, digitalisasi usaha, membentuk jaringan usaha, dan perluasan pemasaran, (3) Pemerintah harus membuat perencanaan dan peta jalan pemulihan ekonomi dan mengorganisir semua pihak yang terkait, dan (4) Kratom patut dijadikan sebagai produk unggulan dan usaha andalan rakyat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agusyanti (2020) Mewaspada Ancaman Krisis Ekonomi Panjang Imbas Pandemi Corona, [katadata.co.id/telaah/2020/04/22](http://katadata.co.id/telaah/2020/04/22), Diunduh 22 April 2020.

Arsyad, L. (2010) *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

- Arsyad, L., Satriawan, E., Mulyo, J.H., Fitriady, A. (2011) *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik (2020) *Kapuas Hulu Dalam Angka*, Putussibau: Badan Pusat Statistik Kapuas Hulu.
- Blanchard, O., Johnson, D.R. (2017) *Makroekonomi*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hadi, S. & Supardi, (2020) Revitalization Strategi for Small and Medium Enterprises after Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19) in Yogyakarta, *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*, Vol. XII, Issue IV (2020) p. 4068-4076.
- Herdiana, D. (2020) Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah corona virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung, *JUMPA*, Vol. 7, No. 1, Juli 2020.
- Iskandar, A., Possumah, B.T., Aqbar, K. (2020) Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7 No. 7 (2020) p. 625-638. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i7.15544.
- Jhingan, M.L., (2012) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Leksono, S. (2013) *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi, Dari Metode ke Metode*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahriani, E. (2020) Model Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7 Issue I, Juni 2020, p. 9-14.
- Nugrahani, F. (2014) Metode Penelitian Kualitatif, dalam penelitian pendidikan bahasa, diunduh 26 Mei 2020 dari [digilibfkip.univetbantara.ac.id](http://digilibfkip.univetbantara.ac.id).
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. (2020) Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi Covid-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, *Prosiding The 11<sup>th</sup> Industrial Research Workshop and National Seminar*, Bandung, 26-27 Agustus 2020.
- Rusastra, I.W. (2011) Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global, *Pengembangan Inovasi Pertanian* 4(2), 2011, p. 87-102
- Salamah, L. (2001) Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XIV, No. 2, April 2001, p. 65-76.
- Siburian, R. (2002) Entikong Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak, *Antropologi Indonesia* 67.
- Singgih, M.N. (2007) Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 3, No. 3, Oktober 2007.
- Sugiri, D. (2020) Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19, *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1, Juli 2020.



- Sunderlin, W.D., Resosudarmo, I.A.P., Rianto, E., dan Angelsen, A. (2000) Dampak Krisis Ekonomi Indonesia terhadap Petani Kecil dan Tutupan Hutan Alam di Luar Jawa, *CIFOR*, Occasional paper No. 28(1), June 2000.
- Timotiusius, T (2020) Tahap Pertama 133 UMKM Kapuas Hulu Terima Bantuan Dari Pemerintah, *Antara*, 31 Agustus 2020.
- Todaro, M.P., Smith, S.C. (2015), *Economic Development*. 12th ed. United States: The George Washington University.
- Tohardi, A. (2019) *Pengantar Metode Penelitian Sosial + Plus*, Pontianak: Tanjungpura University Press, [books.google.co.id](https://books.google.co.id).
- Ulya, H.N. (2020) Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan agropolitian, *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 3 (1), p. 80-109.
- Yudistira, B. (2020) Antara 15 April 2020, [Galamedianews.com/nasional/254245/krisis-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19-sama-dengan-great-depression-tahun-1930-an.html](https://galamedianews.com/nasional/254245/krisis-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19-sama-dengan-great-depression-tahun-1930-an.html). Diunduh 22 April 2020.